



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**Balai Pendidikan dan Pelatihan  
Hukum dan HAM Jawa Tengah**

**2024**



## KATA PENGANTAR

Laporan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dan pencapaian Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah selama Tahun 2024. Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2024 dapat menjadi pertanggungjawaban atas kinerja dan pencapaian Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang.



Semarang, 5 Januari 2025

Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Rinto Gunawan Sitorus**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada Tahun 2024 telah disepakati Perjanjian Kinerja antara Kepala BPSDM Hukum dan HAM dengan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah yang memuat 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu **Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Jawa Tengah** dan **Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah**. Kedua sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 indikator kinerja yang seluruhnya telah mencapai target yang ditetapkan. Secara rinci, capaian Perjanjian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah disajikan pada tabel berikut.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Jawa Tengah	Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum dan HAM terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum dan HAM Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah	3,6 (indeks)	3,81 (indeks)	105,83%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	100%	100%	100%
		Indeks kepuasan satuan kerja lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan	3,1 (indeks)	3,65 (indeks)	117,74%

Dari sisi anggaran, total pagu anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 13.291.666.000 dan telah direalisasikan sebesar **Rp 13.193.874.358** atau **99,26%** dari total anggaran. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah sangat baik karena mampu merealisasikan hampir seluruh pagu anggaran untuk melaksanakan kegiatan dan program yang telah disusun.

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Capaian
Belanja Pegawai	1.563.514.000	1.538.635.722	98,41%
Belanja Barang	10.913.551.000	10.846.166.636	99,38%
Belanja Modal	814.601.000	809.072.000	99,32%
<b>Total</b>	<b>13.291.666.000</b>	<b>13.193.874.358</b>	<b>99,26%</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total pagu anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 13.291.666.000. Pada Tahun 2024 Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah telah menyerap anggaran senilai **Rp 13.193.874.358** atau sebesar **99,26%** dari total anggaran.

Seiring dengan pergantian Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029, tercipta restrukturisasi kementerian dalam kabinet yang baru yang bertujuan untuk memfokuskan fungsi, tugas dan penajaman program-program kementerian sesuai visi pemerintahan saat ini. Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu instansi yang mengalami restrukturisasi (pemisahan) menjadi 4 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, serta Kementerian Hak Asasi Manusia yang ketiganya berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan. Pada masa transisi ini, seluruh proses alih status, termasuk pengalihan kepegawaian serta sarana dan prasarana dari Kementerian Hukum dan HAM ke tiga kementerian baru akan diselesaikan pada pertengahan tahun 2025.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	2
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	3
C. Sumber Daya Manusia .....	8
D. Maksud dan Tujuan.....	10
E. Aspek Strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah ..	12
F. Isu Strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah.....	13
G. Sistematika Laporan .....	15
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>16</b>
A. Rencana Strategis (Renstra) .....	17
B. Perjanjian Kinerja .....	21
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>23</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	24
B. Realisasi Anggaran .....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Simpulan .....	55
B. Saran .....	55
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	9
Grafik 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	9

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Satuan Kerja di Wilayah Kerja Badiklat Kumham Jawa Tengah.....	5
Tabel 2. Jumlah Pegawai di Wilayah Kerja Badiklat Kumham Jawa Tengah.....	6
Tabel 3. Sasaran Strategis Kemenkumham 2020-2024.....	19
Tabel 4. Perjanjian Kinerja .....	21
Tabel 5. Realisasi Perjanjian Kinerja .....	24
Tabel 6. Capaian Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan.....	26
Tabel 7. Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan .....	42
Tabel 8. Kerjasama, Sinergi dan Kolaborasi .....	46
Tabel 9. Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	51
Tabel 10. Capaian Rincian Output.....	51
Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan .....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sebaran Wilayah Kerja Badiklat Kumham Jawa Tengah.....	5
Gambar 2. Struktur Organisasi .....	7
Gambar 3. Skema Penjejang Kinerja.....	19
Gambar 4. Pohon Kinerja Badiklat Kumham Jawa Tengah.....	20
Gambar 5. SMART DJA .....	39
Gambar 6. IKPA.....	40
Gambar 7. E-Monev Bappenas.....	41
Gambar 8. Survei Kepuasan Masyarakat .....	44
Gambar 9. Sarana dan Prasarana Berbasis HAM.....	45
Gambar 10. Kerjasama, Sinergi dan Kolaborasi .....	46



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

**B**alai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang dibentuk pada tanggal 30 Mei 2018 dan beralamat di Jalan Raya Moch Icsan, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah dengan sebaran 11 wilayah kerja yakni provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja merupakan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja di masa mendatang. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

**S**ebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Administrasi.

Pada Tahun 2024 terjadi pergantian Presiden dan Wakil Presiden. Pergantian pimpinan kepala negara ini menciptakan restrukturisasi kementerian dalam kabinet yang baru yang bertujuan untuk memfokuskan fungsi, tugas dan penajaman program-program kementerian sesuai visi pemerintahan saat ini. Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu instansi yang mengalami pemisahan menjadi 4 (empat) kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, serta Kementerian Hak Asasi Manusia yang ketiganya berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan.

Restrukturisasi ini turut menjadikan perubahan nomenklatur di jajaran Kementerian Hukum. Saat ini Kementerian Hukum terdiri dari 8 (delapan) Unit Eselon I yakni Sekretariat Jenderal, Inspektoran Jenderal, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Ditjen Administrasi Hukum Umum, Ditjen Kekayaan

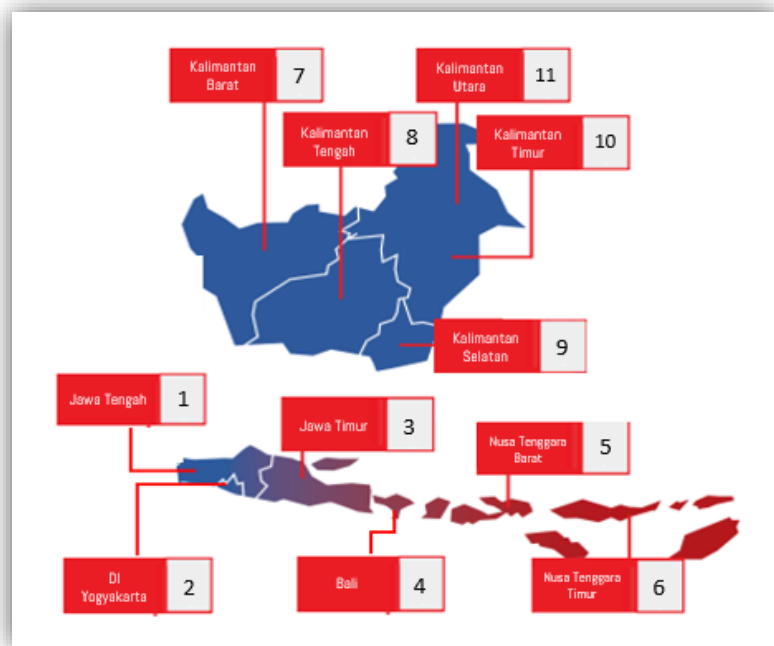
Intelektual, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan BPSDM Hukum. Di wilayah terdapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum di setiap provinsi, Balai Harta Peninggalan serta Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum.

## **Tugas dan Fungsi**

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan tugas tersebut disesuaikan dengan wilayah kerjanya masing-masing. Saat ini telah dibentuk tiga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM di Indonesia, yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara.

Adapun wilayah kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah meliputi 10 Kantor Wilayah pada 11 provinsi yaitu Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

*Gambar 1. Sebaran Wilayah Kerja Badiklat Kumham Jawa Tengah*



Dari 10 Kantor Wilayah di 11 Provinsi, jumlah satuan kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah berjumlah 300 Unit Pelaksana Teknis dengan SDM Aparatur sebanyak 21.274 ASN.

*Tabel 1. Jumlah Satuan Kerja di Wilayah Kerja Badiklat Kumham Jawa Tengah*

No	Kantor Wilayah	Unit Pelaksana Teknis			Total UPT
		PAS	Imigrasi	Lain-Lain	
1	Jawa Tengah	62	7	2	71
2	Jawa Timur	52	10	1	63
3	DI Yogyakarta	15	1	-	16
4	Bali	14	4	-	18
5	NTB	13	3	-	16
6	NTT	21	5	-	26
7	Kalimantan Barat	19	8	-	27
8	Kalimantan Tengah	17	2	-	19
9	Kalimantan Selatan	19	2	-	21

10	Kalimantan Timur	17	6	-	23
<b>Jumlah</b>		<b>249</b>	<b>48</b>	<b>3</b>	<b>300</b>

*Tabel 2. Jumlah Pegawai di Wilayah Kerja Badiklat Kumham Jawa Tengah*

No	Kanwil	Jumlah Pegawai		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Jawa Tengah	3.708	920	4.628
2	D.I.Yogyakarta	916	405	1.321
3	Jawa Timur	3.686	904	4.590
4	Bali	1.464	423	1.887
5	Nusa Tenggara Barat	891	241	1.132
6	Nusa Tenggara Timur	1.202	345	1.648
7	Kalimantan Barat	1.339	352	1.691
8	Kalimantan Timur	1.396	319	1.715
9	Kalimantan Tengah	901	265	1.166
10	Kalimantan Selatan	1.191	306	1.496
<b>Jumlah</b>		<b>16.795</b>	<b>4.479</b>	<b>21.274</b>

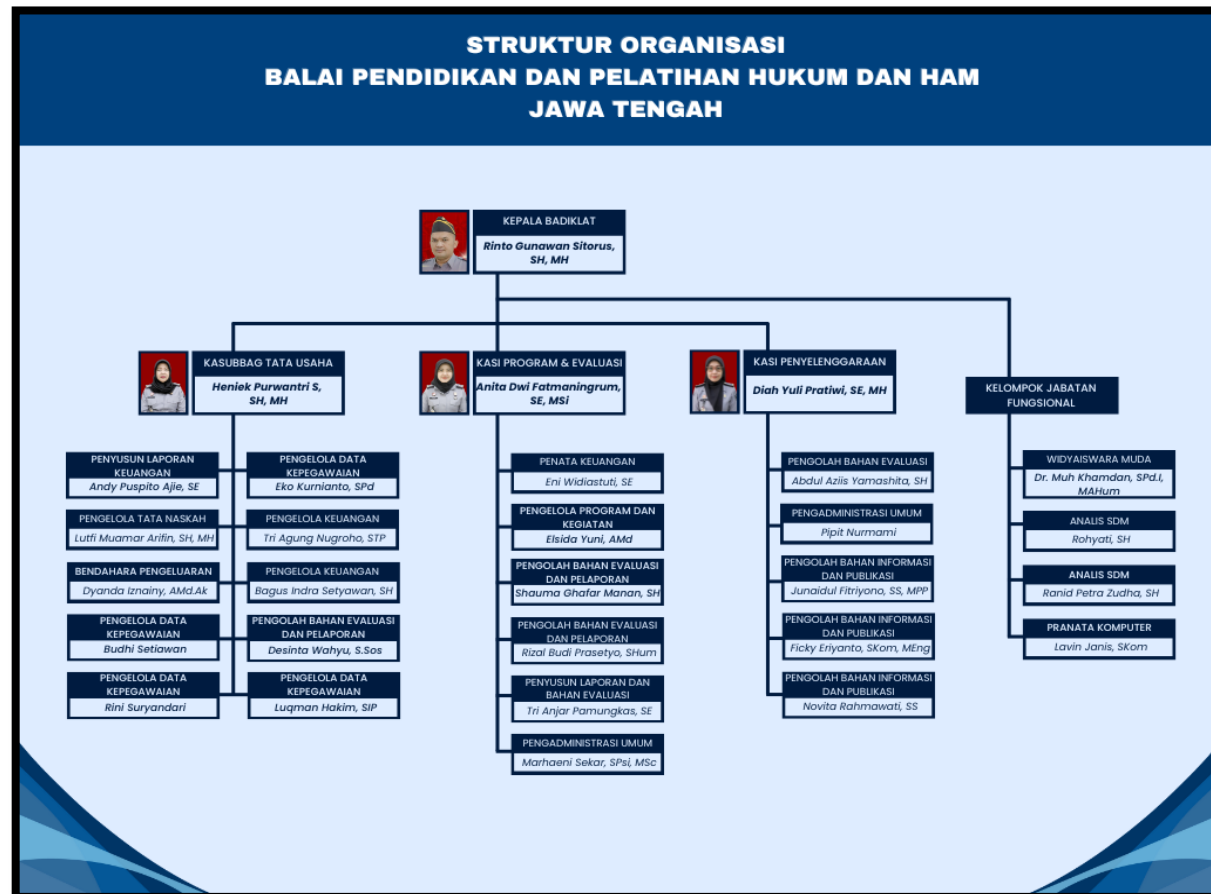
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut :

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
4. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Gambar 2. Struktur Organisasi



### C. Sumber Daya Manusia



**B**alai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan yang dibantu oleh 3 (tiga) Pejabat Pengawas dan didukung oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

<u>Jabatan</u>	<u>Jumlah</u>
Eselon III	1 orang
Eselon IV	3 orang
JFU	21 orang
JFT	4 orang
<b>Total</b>	<b>29 orang</b>

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh 29 ASN dengan berbagai latar belakang pendidikan yang mendukung kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Pembagian tugas dan wewenang Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah terdiri atas:

### 1. Subbagian Tata Usaha

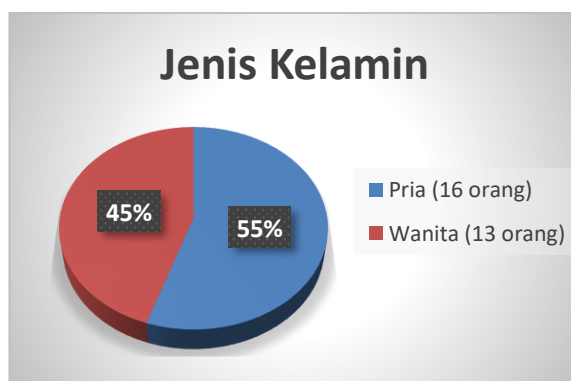
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, anggaran, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, hubungan masyarakat, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, serta urusan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### 2. Seksi Program dan Evaluasi

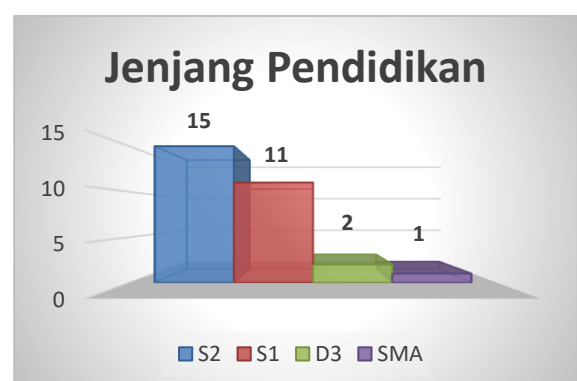
Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas penyiapan dan penyusunan rencana, program, dan kerja sama, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di wilayah.

### 3. Seksi Penyelenggaraan

Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia.



*Grafik 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin*



*Grafik 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan*

## D. Maksud dan Tujuan

**S**ebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja; Petunjuk Teknis Penyusunan Pelaporan Kinerja; Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; Pedoman Evaluasi Kinerja; Pedoman Reviu Laporan Kinerja; Pedoman Reviu LKjIP; Kebijakan penerapan SAKIP.

Maksud Penyusunan LKjIP Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2024 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP serta untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah.
2. Mendorong Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada stakeholder terhadap Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja. Dokumen LKjIP ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggara negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya

dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Didalam LKjIP ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan.

5. Sebagai Bahan Evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan Kegiatan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tahun yang akan datang.

Maksud dan tujuan dari akuntabilitas kinerja ini juga agar visi, misi dan pencapaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dapat tercapai sesuai dengan target dan sasaran strategis. LKjIP ini merupakan sistem pengendalian manajemen di sektor publik yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaiannya kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang serta bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

## E. Aspek Strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah

Pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia telah diatur bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Tugas yang diemban tersebut tentunya memiliki peran yang sangat strategis dalam mengembangkan kompetensi ASN.

Aspek strategis tersebut sejalan dengan menyesuaikan kerangka regulasi dan kelembagaan yang menetapkan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 2) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 3) Pelaksanaan standarisasi sertifikasi, akreditasi dan sistem pengembangan kompetensi SDM di Bidang Hukum dan HAM dalam skema Corporate University;
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM;
- 5) Pelaksanaan administrasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM.

## F. Isu Strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah

**D**alam pelaksanaan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah tentu akan selalu dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Namun demikian, permasalahan dan segala keterbatasan yang ada bukan menjadi penghalang kegiatan, namun harus menjadi motivasi untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik. Permasalahan yang ada selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi dasar kebijakan penetapan tujuan dan sasaran, sehingga program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Dalam konteks internal kelembagaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah sendiri terdapat beberapa isu strategis yang pada akhirnya mendorong teridentifikasinya kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi dalam upaya pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada sisi sumber daya manusia dan organisasi, belum terpetakannya profil kompetensi yang disandingkan dengan analisis jabatan dan beban kerja telah memicu kendala yang cukup berarti, sehingga mengakibatkan:

- Beban kerja yang belum merata
- Kompetensi pegawai yang belum merata
- Penempatan pegawai yang belum sesuai dengan kompetensi

Di samping hal tersebut, terdapat pula beberapa kompetensi yang masih sangat membutuhkan upaya peningkatan lebih lanjut, seperti; Teknologi Informasi, Desain Program Pembelajaran (pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran), Manajemen Penyelenggaraan Program Pelatihan, serta kebutuhan yang cukup mendesak pula atas peningkatan etos dan budaya kerja profesional. Berbagai hal tersebut pada akhirnya telah memicu pencapaian kinerja organisasi yang belum optimal, serta tidak terlaksananya berbagai program pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi dengan metodologi yang mutakhir.

Dalam hal metodologi pembelajaran sendiri, telah dimilikinya program pembelajaran berbasis e-learning, serta ketersediaan instrumen evaluasi pembelajaran dan paska pelatihan (meskipun masih membutuhkan upaya

pemutakhiran agar memberikan hasil yang maksimal), telah menjadi suatu kekuatan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah yang mendorong peningkatan jumlah pegawai yang mendapatkan program pengembangan kompetensi, serta dapat terukurnya peningkatan kompetensi peserta pelatihan, dan kualitas penyelenggaraan pelatihan.

Namun demikian, dalam hal metodologi ini pula didapatkan indikasi bahwa masih belum terjadi kesesuaian antara metodologi pembelajaran dengan kebutuhan pegawai Kemenkumham serta alokasi anggaran. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada:

1. kualitas program pengembangan kompetensi pegawai Kemenkumham yang belum maksimal,
2. belum meratanya pengembangan kompetensi pegawai Kemenkumham, berdasarkan UU ASN No 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah memiliki inovasi yang digunakan untuk menunjang kinerja diantaranya:

- BLC (*Balai Pendidikan dan Pelatihan Learning Center*) yang merupakan portal pembelajaran mandiri milik Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah;
- SILABA (Sistem Informasi Pelatihan Balai Pendidikan dan Pelatihan Jateng) merupakan sebuah framework yang dibangun untuk memudahkan Satuan Kerja di wilayah kerja dalam menyampaikan kebutuhan pelatihan bagi para pegawai;
- ITU (Informasi Tata Usaha) merupakan aplikasi informasi tata usaha meliputi keuangan dan BMN, Kepegawaian, dan Umum;
- JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional) merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

## G. Sistematika Laporan

**L**aporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I – Pendahuluan**, menyajikan informasi mengenai latar belakang penyusunan LKjIP, tugas, fungsi dan struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah, Maksud dan Tujuan, Aspek Strategis, Isu Strategis, serta Sistematika Laporan;

**Bab II – Perencanaan Kinerja**, menyajikan ringkasan mengenai perencanaan kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja utama, target dan program kerja sesuai perjanjian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2024;

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan ringkasan mengenai pengukuran kinerja dan penyerapan anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2024 mencakup :

- a. Capaian Kinerja Organisasi, disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi beserta capaian kinerja anggaran dan capaian lainnya.
- b. Realisasi Anggaran, diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Bab IV – Penutup**, menyajikan ringkasan mengenai tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Tahun 2024 yang dirangkum dalam simpulan dan saran atas Akuntabilitas Kinerja.

A close-up photograph of a fountain pen and a decorative pen holder. The fountain pen is silver with a dark nib and is lying on a wooden surface. The pen holder is also silver and has a decorative, fleur-de-lis-like design. The background is a dark, textured surface, possibly wood or stone. The text "BAB II PERENCANAAN KINERJA" is overlaid on the image in a bold, black, sans-serif font.

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

## A. Rencana Strategis (Renstra)

Dalam melaksanakan tugas dan pembangunan di bidang hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai visi, misi, dan tujuan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pemajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Tahun 2020-2024 diharapkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang semakin baik serta profesional, aparaturnegara di pusat dan daerah semakin mampu mendukung pembangunan nasional seperti yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017.

Kementerian Hukum dan HAM mempunyai **visi** yaitu :

**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden  
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan **misi** sebagai berikut:

1. Penegakan dan kesadaran hukum serta penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
2. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Guna melaksanakan misi yang telah ditetapkan, maka **tujuan** yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM antara lain :

1. Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia;
2. Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 merupakan hasil formulasi strategi yang dilakukan dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis dan tujuan yang ingin diwujudkan organisasi. Setiap perubahan lingkungan strategis akan mempengaruhi upaya organisasi dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada Tahun 2022, terdapat perubahan lingkungan strategis meliputi terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Terbitnya undang-undang ini mempengaruhi penyelenggaraan layanan pemasyarakatan. Selain itu, keluarnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merubah beberapa struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah mengharuskan seluruh K/L menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan *logic model* yang diterjemahkan menjadi standar kinerja yang akan menjadi bagian dari target kinerja dan pendanaan.

Berdasarkan perubahan regulasi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam tabel berikut.

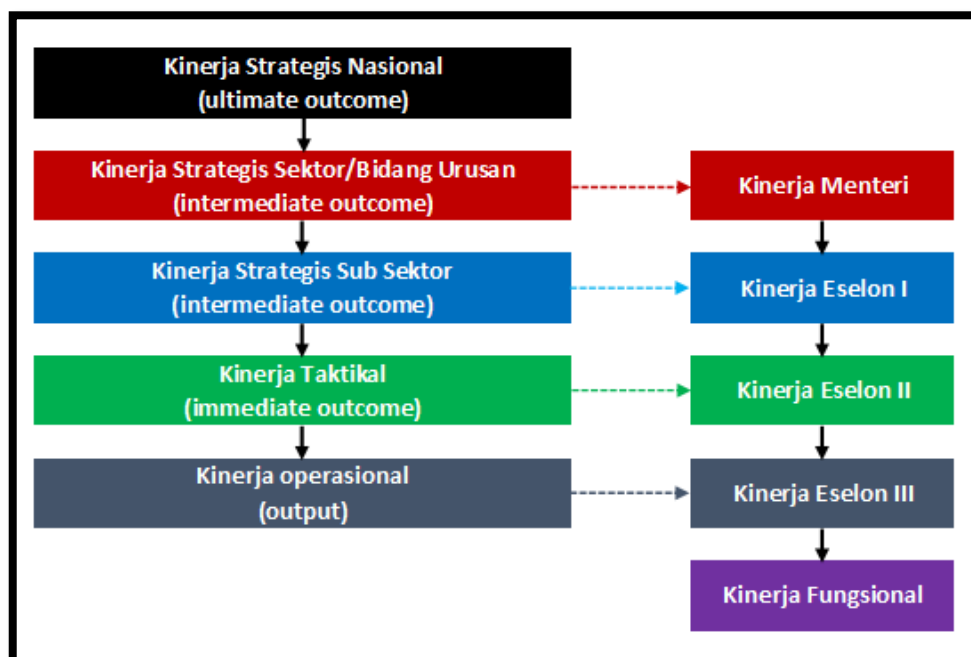
**Tabel 3. Sasaran Strategis Kemenkumham 2020-2024**

(Sumber: Rencana Strategis Perubahan Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024)

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Mendukung Sasaran Pembangunan Nasional
SS.1	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat	IKSS 1.1 Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat	Penegakan Hukum Nasional yang Mantap
SS.2	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien	IKSS 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

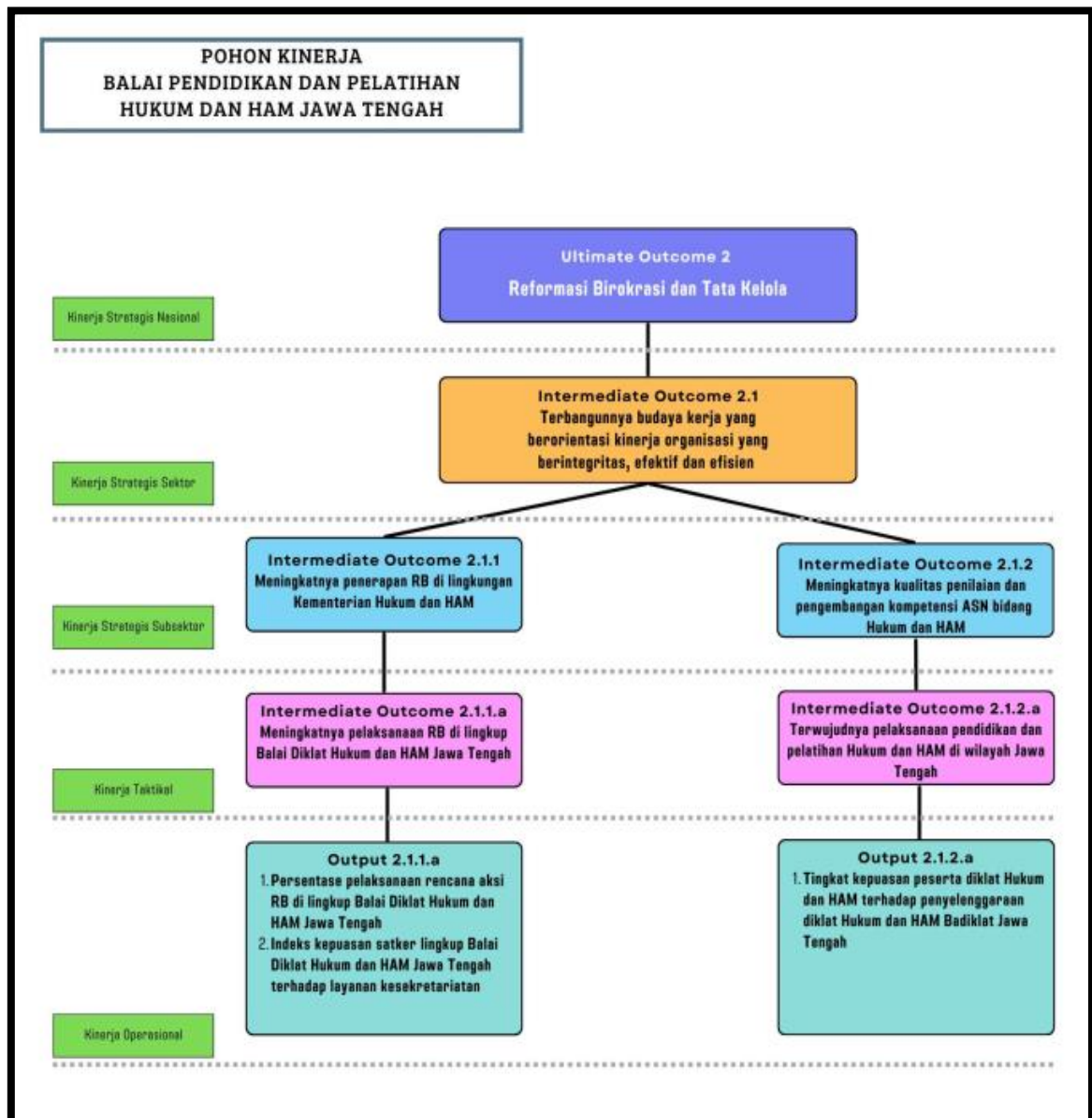
Menteri Hukum dan HAM memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dalam mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional. SS dan IKSS ini menjadi tujuan utama seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang diterjemahkan dalam pohon kinerja melalui penjenjangan kinerja dengan skema sebagai berikut.

**Gambar 3. Skema Penjenjangan Kinerja**



Berdasarkan SS dan IKSS Menteri Hukum dan HAM yang diturunkan secara berjenjang kepada Unit Eselon I hingga Unit Pelaksana Teknis, maka penjabaran pohon kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah yang merupakan turunan dari pohon kinerja BPSDM Hukum dan HAM sebagai berikut.

Gambar 4. Pohon Kinerja Badiklat Kumham Jawa Tengah



## B. Perjanjian Kinerja

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 mempengaruhi sasaran, indikator kinerja, dan penganggaran yang akan dicapai satuan kerja di jajarannya, yang turut mengubah Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah dokumen berisikan penugasan dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator dan target kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja inilah kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Berikut Perjanjian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2024 (dokumen legal terlampir).

*Tabel 4. Perjanjian Kinerja*

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Jawa Tengah	Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum dan HAM terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum dan HAM Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah	3,6 (indeks)
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	100%
		Indeks kepuasan satuan kerja lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan	3,1 (indeks)

No	Kegiatan	Anggaran
<b>Penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara</b>		<b>Rp 13.291.666.000</b>
1.	Layanan BMN	Rp 48.780.000
2.	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp 12.815.000
3.	Layanan Protokoler	Rp 51.000.000
4.	Layanan Umum	Rp 274.660.000
5.	Layanan Perkantoran	Rp 5.125.850.000
6.	Layanan Sarana Internal	Rp 466.845.000
7.	Layanan Prasarana Internal	Rp 347.756.000
8.	Layanan Manajemen SDM	Rp 430.920.000
9.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Rp 6.313.585.000
10.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 71.862.000
11.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 47.155.000
12.	Layanan Manajemen Keuangan	Rp 56.470.000
13.	Layanan Reformasi Kinerja	Rp 42.968.000
14.	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Rp 1.000.000



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan kinerja sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang ditetapkan perlu dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan target dan realisasi sebagaimana yang ditelah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja.

*Tabel 5. Realisasi Perjanjian Kinerja*

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Jawa Tengah	Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum dan HAM terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum dan HAM Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah	3,6 (indeks)	3,81 (indeks)	105,83%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	100%	100%	100%
		Indeks kepuasan satuan kerja lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan	3,1 (indeks)	3,65 (indeks)	117,74%

## SASARAN KEGIATAN 1

### Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Jawa Tengah

#### 1. Tingkat Kepuasan Peserta Diklat Hukum dan HAM terhadap Penyelenggaraan Diklat Hukum dan HAM Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah

##### a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum dan HAM terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum dan HAM Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah	3,6	3,81	105,83%

Tingkat kepuasan peserta diukur berdasarkan 3 (tiga) indikator, yakni Evaluasi Tenaga Pengajar, Evaluasi Modul Pelatihan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan dengan formulasi sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Kepuasan Peserta} = [(W_1 \times A) + (W_2 \times B) + (W_3 \times C)] \times 4$$

Keterangan:

A: Persentase Evaluasi Tenaga Pengajar

B: Persentase Evaluasi Modul Pelatihan

C: Persentase Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan

Dimensi	Indikator	Bobot (W)
A	Persentase Evaluasi Tenaga Pengajar	30%
B	Persentase Evaluasi Modul Pelatihan	30%
C	Persentase Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan	40%

**Tabel 6. Capaian Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan**

No	Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Metode	Output		Tingkat Kepuasan Peserta
				Target	Capaian	
1	Pelatihan Administrasi Perkantoran Tk. Dasar PJJ Angkatan I-II	16 – 28 Februari 2024	PJJ	80	80	3,77
2	Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar	19 Februari – 1 Maret 2024	Klasikal	40	40	3,86
3	MOOC Keprotokolan	Februari 2024	MOOC	400	825	-
4	Pelatihan Administrasi Kepegawaian Angkatan I-II	14 Maret – 1 April 2024	PJJ	80	80	3,71
5	Webinar "Organisasi dan Aparatur Adaptif"	19 Maret 2024	Hybrid	180	1172	3,89
6	MOOC Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar	Maret 2024	MOOC	400	807	-
7	Pelatihan Teknis Pembentukan Kedisiplinan Masyarakat (Kesamaptaan)	17 - 29 April 2024	Klasikal	40	40	3,61
8	Pelatihan Teknis Legal Drafting / Perancangan Peraturan Per UU	13 - 22 Mei 2024	Klasikal	40	40	3,70
9	Pelatihan Teknis Masyarakat Assesment dan Klasifikasi WBP	13 - 22 Mei 2024	Klasikal	40	40	3,90
10	Webinar "Birokrasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045: Peluang dan Tantangan"	28 Mei 2024	Hybrid	200	1.115	3,88
11	Pelatihan Kehumasan dan Corporate Branding Angkatan I-II	3 - 14 Juni 2024	Klasikal	80	80	3,81
12	Pelatihan Sistem Database Masyarakat (SDP) Angkatan I-II	10 - Juni 2024	PJJ	80	80	3,75
13	Pelatihan SPIP dan MR	24 - 28 Juni 2024	Klasikal	40	40	3,90
14	Pelatihan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	9 - 19 Juli 2024	Klasikal	40	40	3,84
15	Pelatihan Teknis Keimigrasian Sistem Pengamanan Data dan Sistem Informasi Keimigrasian	12 - 23 Agustus 2024	Klasikal	40	40	3,84
16	Pelatihan Bahasa Isyarat	19 - 23 Agustus 2024	Klasikal	40	40	3,96
17	Pelatihan Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran	19 - 25 September 2024	Klasikal	40	40	3,78
18	Pelatihan Penyusunan LKJIP Angkatan I-II	14 - 24 Oktober 2024	PJJ	80	80	3,75
19	Pelatihan Kehumasan Desain Grafis dan Fotografi	11 - 20 November 2024	Klasikal	40	40	3,96

No	Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Metode	Output		Tingkat Kepuasan Peserta
				Target	Capaian	
20	Webinar "Peningkatan Keterampilan Komunikasi untuk Kinerja Profesional"	28 November 2024	Hybrid	225	2.971	3,86
21	MOOC Pelayanan Publik Tingkat Dasar	November 2024	MOOC	400	603	3,76
22	Pelatihan Dasar CPNS	2 Sep – 15 Des 2024	Blended Learning	395	395	3,82
23	Webinar "Refleksi Akhir Tahun 2024 dan Resolusi Tahun 2025"	18 Desember 2024	PJJ		3.289	3,85
<b>Total</b>				<b>3.000</b>	<b>11.977</b>	<b>3,81</b>

Pada Tahun 2024 Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah telah menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan di antaranya pelatihan teknis, MOOC dan webinar series dengan total capaian output 11.977 orang, melebihi target yang ditetapkan yakni 3.000 orang.

Dari pelaksanaan pelatihan tersebut juga telah dilakukan evaluasi untuk mengukur keberhasilan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam memberikan layanan pelatihan bagi para peserta yang diukur dari penilaian terhadap tenaga pengajar, modul pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan. Dari hasil seluruh evaluasi tersebut diperoleh capaian tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat Hukum dan HAM sebesar 3,81 dari target 3,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah telah **mencapai target** untuk menyelenggarakan Diklat Hukum dan HAM yang berkualitas bagi ASN Kementerian Hukum dan HAM.

**b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum dan HAM terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum dan HAM Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah	92%	93,65%	101,79%	3,6	3,81	105,83%

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi tingkat kepuasan peserta diklat tahun 2023 sebesar 93,65% dengan capaian 101,79% dan tahun 2024 realisasi sebesar 3,81 (indeks) dengan capaian 105,83%. Meskipun realisasinya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan perubahan target indeks seperti yang tertuang pada Permenkumham No.7 Tahun 2024 tentang Renstra Perubahan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, namun secara umum realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 telah meningkat dan lebih baik dibandingkan tahun 2023.

**c) Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah pada Renstra**

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum dan HAM terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum dan HAM Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah	80%	100%	85%	93%	90%	95%	92%	93,65%	3,6	3,81

Dari tabel di atas diketahui bahwa target jangka menengah indikator ini selalu mengalami peningkatan mulai tahun 2020 sampai dengan 2023. Namun

dikarenakan perubahan Renstra Kemenkumham sesuai Permenkumham No.7 Tahun 2024 maka target tahun 2024 juga berubah menjadi indeks. Apabila dilakukan perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah pada Renstra, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah secara umum telah mencapai target yang ditetapkan.

**d) *Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional***

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

**e) *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan***

Keberhasilan pencapaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dipengaruhi oleh :

- Pelatihan yang diselenggarakan merupakan pelatihan yang dibutuhkan oleh pegawai untuk mendukung peningkatan kinerja mereka;
- Dalam mendukung Kemenkumham Corporate University Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan berbasis online seperti webinar yang bersifat terbuka sehingga memungkinkan pencapaian output peserta jauh melebihi target yang telah ditetapkan;
- Para Widyaiswara yang dihadirkan baik secara klasikal maupun daring merupakan pegajar yang kompeten dan ahli di bidangnya;
- Para panitia penyelenggara juga aktif dalam memberikan informasi dan pendampingan selama pelatihan berlangsung;
- Hasil pelatihan yang diterima oleh para peserta sangat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini dirasakan oleh para pejabat pengawas yang di satuan kerja peserta yang juga menjadi responden evaluasi.

Di samping itu juga terdapat kendala yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja ini. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah telah memetakan kendala tersebut beserta mitigasi risikonya seperti pada tabel berikut.

No	Kendala / Permasalahan	Mitigasi Risiko
1	Minimnya jumlah Widyaiswara untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar secara mandiri	Mengajukan permohonan kepada BPSDM Hukum dan HAM serta bekerja sama dengan instansi lain dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengajar
2	Perubahan jadwal diklat yang menyesuaikan tenaga pengajar terutama jika pengajar merupakan pejabat atau pimpinan tinggi	Berkoordinasi sebelum jadwal pelaksanaan dan mempersiapkan kemungkinan pergeseran dengan jadwal pemateri lain agar tidak terjadi kekosongan waktu sehingga kegiatan tetap berjalan
3	Bahan modul tidak update	Menyampaikan permohonan modul terupdate kepada BPSDM Hukum dan HAM dan meminta pengajar untuk menyampaikan materi sesuai dengan peraturan dan isu terbaru
4	Aplikasi e-learning mengalami kendala pada server.	Melakukan komunikasi dengan Pusdatin dan BPSDM Hukum dan HAM serta berkoordinasi dengan tenaga pengajar untuk penjadwalan ulang pelatihan.

Sumber : Dokumen Manajemen Risiko Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah

#### **f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah mampu mencapai target kinerja.

**g) Analisis Kegiatan Penunjang Keberhasilan**

Kegiatan penunjang keberhasilan Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yaitu adanya kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan Kantor Wilayah dan Unit Eselon I.

## SASARAN KEGIATAN 2

### Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah

#### 1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah

##### a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	100%	100%	100%

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh indikator rencana aksi Reformasi Birokrasi yang dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$= \frac{\text{rencana aksi RB yang terlaksana}}{\text{total rencana aksi RB}} \times 100\%$$
$$= \frac{117}{117} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

**b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	-	-	-	100%	100%	100%

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Tahun 2024 tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai Permenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya.

**c) Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah pada Renstra**

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Tahun 2024 tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai Permenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

**d) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

**e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Keberhasilan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2024 karena adanya dukungan dari Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Unit Eselon I dalam menyelenggarakan rencana aksi reformasi birokrasi.

**f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah mampu mencapai target kinerja.

**g) Analisis Kegiatan Penunjang Keberhasilan**

Kegiatan penunjang keberhasilan Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yaitu adanya kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan Kantor Wilayah dan Unit Eselon I.

## 2. Indeks Kepuasan Satuan Kerja Lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM terhadap Layanan Kesekretariatan

### a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks kepuasan satuan kerja lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan	3,1	3,65	117,74%

Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan melalui survey yang diisi oleh para pegawai dengan parameter sebagai berikut:

1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
2. Kejelasan informasi layanan (L2)
3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
6. Kepuasan terhadap pemberi layanan (staf/petugas) (L6)
7. Kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan (staf/petugas) (L7)
8. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L8)
9. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L9)
10. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L10)

Dari hasil survey diperoleh bahwa indeks kepuasan layanan kesekretariatan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah sebesar 3,65 dan capaian indeks sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{3,65}{3,1} \times 100\% = \mathbf{117,74\%} \end{aligned}$$

**b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan satuan kerja lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan	-	-	-	3,1	3,65	117,74%

Indeks kepuasan satuan kerja lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan pada Tahun 2024 tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai Permenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya.

**c) Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah pada Renstra**

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks kepuasan satuan kerja lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,65

Indeks kepuasan satuan kerja lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan pada Tahun 2024 tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai Permenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

#### **d) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

#### **e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Keberhasilan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2024 karena adanya dukungan dari seluruh unsur Badiklat Jawa Tengah dalam menyediakan layanan kesekretariatan.

Di samping itu beberapa kendala yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja ini serta mitigasi risikonya seperti pada tabel berikut.

No	Kendala / Permasalahan	Mitigasi Risiko
1	Pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai target waktu	Segera melakukan penyusunan rencana kerja masing-masing pemangku kegiatan
2	Penatausahaan BMN masih belum sesuai pedoman	Melakukan inventarisasi ulang terhadap seluruh aset negara dan melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap penggunaan aset negara
3	Keterlambatan pengumpulan data kebutuhan anggaran dari masing-masing seksi	Menyusun pemetaan kebutuhan anggaran berdasarkan estimasi kebutuhan
4	Adanya refocusing anggaran dan perubahan kegiatan	Melakukan penyesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan (revisi).
5	Pengadaan barang dan jasa yang kurang berkualitas	Penyediaan barang dan jasa dilaksanakan secara terbuka
6	Belum tertampungnya usulan kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan	Membuat inovasi Aplikasi untuk menampung kebutuhan pelatihan dalam bentuk Aplikasi Sistem Informasi Pelatihan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah (SILABA)
7	Kerjasama dengan instansi lain tidak berlanjut	Pimpinan memberikan arahan kepada seluruh jajarannya, dan selalu melakukan komunikasi positif dengan instansi lain.
8	Terjadinya pelanggaran kode etik dalam pelayanan	Pembuatan SOP terkait pelayanan dan memaksimalkan layanan pengaduan

Sumber : Dokumen Manajemen Risiko Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah

**f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah mampu mencapai target kinerja.

**g) Analisis Kegiatan Penunjang Keberhasilan**

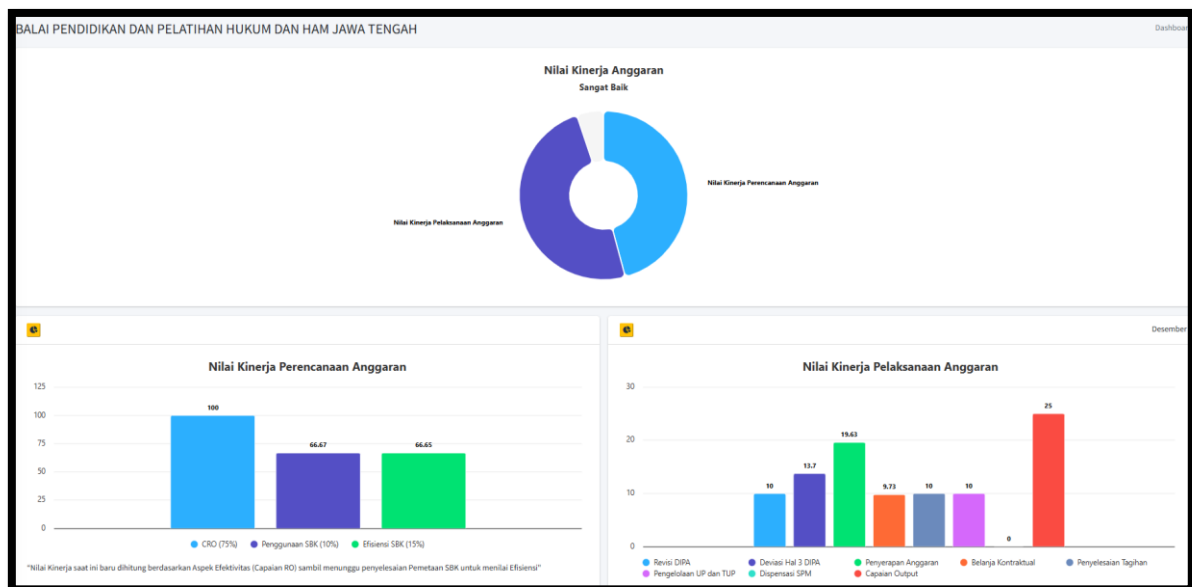
Kegiatan penunjang keberhasilan Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yaitu adanya kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan Kantor Wilayah dan Unit Eselon I.

## CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

### 1) SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan satuan kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Berikut nilai capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Aplikasi SMART DJA:

Gambar 5. SMART DJA



Nilai Kinerja Anggaran pada SMART DJA diukur berdasarkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari aspek efektivitas (capaian RO) dan aspek efisiensi (penggunaan SBK dan efisiensi SBK). Sementara untuk Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari beberapa indikator IKPA. Dari hasil perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, diperoleh Nilai Kinerja Anggaran SMART DJA Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan kualifikasi **Sangat Baik**.

## 2) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil anggaran dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah memperoleh nilai IKPA Tahun 2024 sebesar **98,07** dengan komponen sebagai berikut:

Gambar 6. IKPA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA																
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH																
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
Sampai Dengan : DESEMBER																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	026	013	409157	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	Nilai	100.00	91.36	98.16	97.33	100.00	100.00	100.00	98.07	100%	0.00	98.07
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	13.70	19.63	9.73	10.00	25.00					
					Nilai Aspek	95.68		98.87			100.00					

- Revisi DIPA dengan nilai 100
- Deviasi Halaman III DIPA dengan nilai 91,36
- Penyerapan Anggaran dengan nilai 98,16
- Belanja Kontraktual dengan nilai 97,33
- Penyelesaian Tagihan dengan nilai 100
- Pengelolaan UP dan TUP dengan nilai 100
- Capaian output dengan nilai 100

## CAPAIAN KINERJA LAINNYA

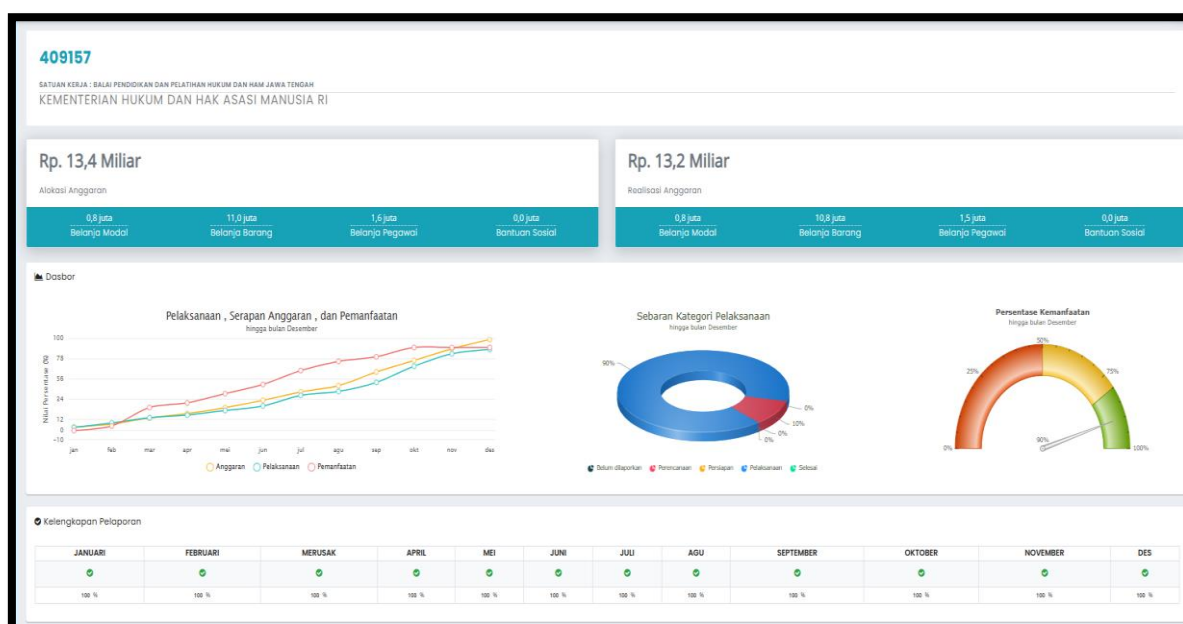
### 1) E-Performance Kementerian Hukum dan HAM

E-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja.

### 2) E-Monev Bappenas

Aplikasi E-Monev Bappenas adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L). Lebih lanjut, aplikasi e-monev Bappenas juga digunakan untuk pemantauan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Aplikasi E-Monev Bappenas adalah sebagai berikut:

Gambar 7. E-Monev Bappenas



### 3) Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP)

Kualitas suatu program pelatihan dipengaruhi oleh kualitas penyelenggaraan sehingga akan berdampak pada kualitas alumni pelatihan serta Kementerian Hukum dan HAM secara khusus. Menurut Kickpatrick, peserta pelatihan dianggap telah belajar apabila pada dirinya telah ada perubahan sikap, peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, evaluasi program pelatihan perlu dilakukan secara menyeluruh untuk mengukur efektivitas program pelatihan yang telah dilaksanakan berdasarkan ketiga aspek tersebut. Keberhasilan peserta pelatihan dapat dilihat melalui terjadinya peningkatan pengetahuan, keterampilan serta perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) merupakan langkah strategis dalam rangka proses pengembangan program pelatihan ataupun pengembangan sumber daya manusia itu sendiri.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah telah melaksanakan EPP dalam rangka mengukur ketercapaian target kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2024 yaitu alumni diklat yang meningkat kinerjanya. Adapun EPP yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagai berikut :

*Tabel 7. Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan*

No.	Nama Pelatihan	Metode	Waktu Pelaksanaan EPP	Jumlah Alumni	Peningkatan Kinerja Alumni
1	Pelatihan Teknis Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar Angkatan I-II	PJJ	Semester I 2024	80	96,20
2	Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar	Klasikal	Semester I 2024	40	94,50
3	Pelatihan Administrasi Kepegawaian Angkatan I-II	PJJ	Semester I 2024	80	95,30
4	Pelatihan Teknis Pembentukan Kedisiplinan Masyarakat (Kesamaptaan)	Klasikal	Semester I 2024	40	95,40

No.	Nama Pelatihan	Metode	Waktu Pelaksanaan EPP	Jumlah Alumni	Peningkatan Kinerja Alumni
5	Pelatihan Teknis Legal Drafting/ Perancangan Peraturan Per UU	Klasikal	Semester I 2024	40	95,20
6	Pelatihan Teknis Pemasarakatan Asesmen dan Klasifikasi WBP	Klasikal	Semester I 2024	40	96,60
7	Pelatihan Kehumasan dan Corporate Brading Angkatan I-II	Klasikal	Semester I 2024	80	96,40
8	Pelatihan Teknis Sistem Database Pemasarakatan (SDP) Angkatan I-II	PJJ	Semester I 2024	80	94,30
<b>Rata-rata</b>					<b>95,50</b>

Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa kinerja alumni pelatihan cenderung meningkat setelah mengikuti pelatihan sebesar 95,50%, alumni termotivasi untuk mengimplementasikan hasil pelatihan dalam pelaksanaan tugas fungsinya dan melaksanakan *action plan* yang mendukung kinerjanya.

Adapun pelatihan yang dilaksanakan pada Semester II Tahun 2024 akan dilakukan EPP sebagaimana kebijakan bahwa Evaluasi Pasca Pelatihan Teknis dan Fungsional dapat dilaksanakan paling cepat 6 (enam) bulan setelah pelatihan selesai dilaksanakan.

#### 4) Survey Kepuasan Masyarakat

Akselerasi pemerataan akses pengembangan kompetensi yang dilakukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa berdampak pada peningkatan persepsi layanan yang semakin baik. Hal itu dapat dilihat dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan tiap bulan yang menjadi dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK).

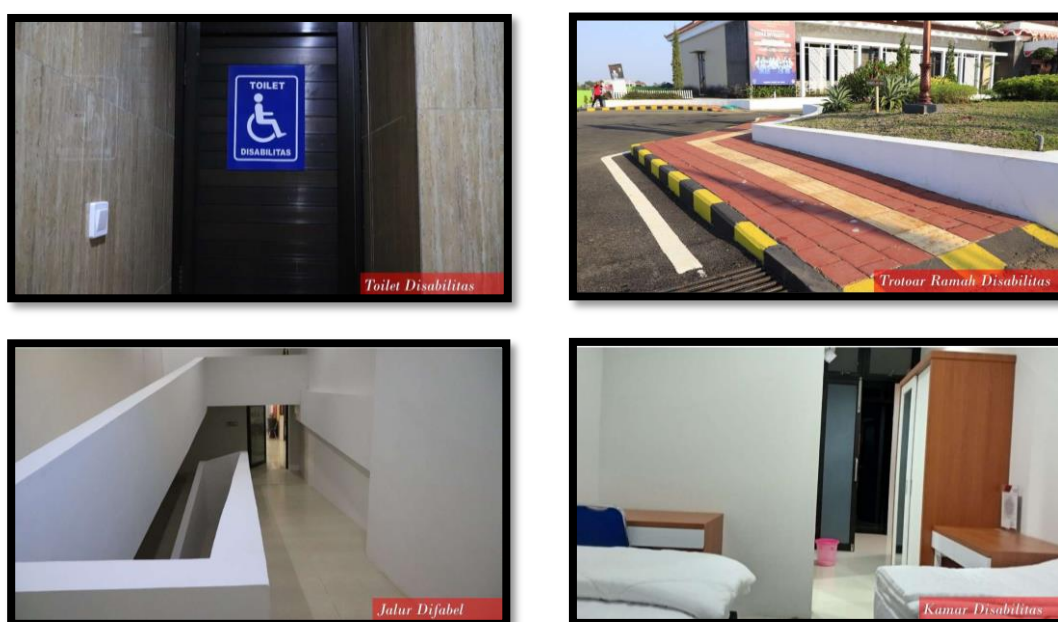
Gambar 8. Survei Kepuasan Masyarakat



## 5) Pelayanan Publik Berbasis HAM

Dalam rangka mewujudkan amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM), Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah turut serta dalam penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) dengan melengkapi sarana dan prasarana serta fasilitas yang berbasis HAM di antaranya :

*Gambar 9. Sarana dan Prasarana Berbasis HAM*



## 6) Kerjasama, Sinergi dan Kolaborasi

Kerjasama, sinergi dan kolaborasi merupakan kunci keberhasilan kerja. Sinergi dapat di maknai sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan melalui kolaborasi masing-masing pihak yang tentunya memberikan manfaat baik untuk organisasi.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan Tahun 2024 melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam hal pengembangan kompetensi dengan para Lemdik Kementerian/ Provinsi/ Kota/ Kabupaten lainnya. Kerjasama ini dilakukan dalam

rangka mewujudkan Aparatur Negeri Sipil yang unggul dan berkelas dunia serta untuk meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal pengembangan kompetensi AN melalui sistem pembelajaran terintegrasi.

*Gambar 10. Kerjasama, Sinergi dan Kolaborasi*



Berikut kerjasama, sinergi dan kolaborasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan instansi lain yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024.

*Tabel 8. Kerjasama, Sinergi dan Kolaborasi*

NO	INSTANSI	BENTUK KERJA SAMA
1	Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngaliyan	Pemanfaatan sarana dan prasarana pada Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah
2	UPTD Puskesmas Ngaliyan	Standarisasi pelatihan BPSDM Hukum dan HAM

NO	INSTANSI	BENTUK KERJA SAMA
3	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang	Standarisasi pelatihan BPSDM Hukum dan HAM
4	Rindam IV Diponegoro Magelang	Pelatihan Kesamaptaan
5	UIN Walisongo	Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi
6	Universitas Negeri Semarang	Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi
7	Pusdiklat Pengawasan BPKP	Pelatihan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Penyusunan Manajemen Risiko

## 7) Prestasi / Penghargaan

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah telah memperoleh beberapa penghargaan atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024, antara lain :

1. Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan antara Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dan Balai Pelatihan Kesehatan Semarang



2. Terbaik III Kategori Penilaian Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Satker  
Lingkup KPPN Tipe A1 Semarang I



3. Terbaik III Kategori Capaian Pengelolaan Infografis dan Videografis  
Semester I Tahun 2024 (Penghargaan dari Kantor Wilayah Jawa Tengah)



4. Penghargaan Kategori Poster/Infografis Terfavorit dan Publikasi/Glorifikasi Terbanyak (Penghargaan dari BPSDM Hukum dan HAM)



5. Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (Penghargaan dari Kementerian HAM)



6. Penghargaan atas Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan HAM Terbaik (Penghargaan dari Kantor Wilayah Jawa Tengah)



## B. Realisasi Anggaran

**R**ealisasi anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 9. Realisasi Anggaran Tahun 2024*

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Capaian
Belanja Pegawai	1.563.514.000	1.538.635.722	98,41%
Belanja Barang	10.913.551.000	10.846.166.636	99,38%
Belanja Modal	814.601.000	809.072.000	99,32%
<b>Total</b>	<b>13.291.666.000</b>	<b>13.193.874.358</b>	<b>99,26%</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total pagu anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 13.219.666.000. Pada Tahun 2024 Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah telah menyerap anggaran senilai **Rp 13.193.874.358** atau sebesar **99,26%** dari total anggaran. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah sangat baik karna mampu merealisasikan hampir seluruh pagu anggaran untuk melaksanakan kegiatan dan program yang telah disusun.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah ditetapkan Rincian Output pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan aparatur negara di Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah. Adapun alokasi anggaran dan realisasi rincian output tersebut adalah sebagai berikut :

*Tabel 10. Capaian Rincian Output*

Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
Layanan BMN	48.780.000	48.626.405	99,69%
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	12.815.000	12.802.500	99,90%
Layanan Protokoler	51.000.000	50.700.000	99,41%
Layanan Umum	274.660.000	272.283.125	99,13%
Layanan Perkantoran	5.125.850.000	5.081.406.277	99,13%

Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
Layanan Sarana Internal	466.845.000	461.675.000	98,89%
Layanan Prasarana Internal	347.756.000	347.397.000	99,90%
Layanan Manajemen SDM	430.920.000	428.514.426	99,44%
Layanan Pendidikan dan Pelatihan	6.313.585.000	6.284.247.348	99,54%
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	71.862.000	66.661.463	92,76%
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	47.155.000	43.970.120	93,25%
Layanan Manajemen Keuangan	56.470.000	53.844.194	95,35%
Layanan Reformasi Kinerja	42.968.000	41.746.500	97,16%
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.000.000	-	-
<b>Total</b>	<b>13.291.666.000</b>	<b>13.193.874.358</b>	<b>99,26%</b>

Pada awal Tahun 2024 telah ditetapkan pagu anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah sebesar Rp 9.786.483.000 sesuai DIPA Nomor SP DIPA-013.12.2.409157/2024 tanggal 24 November 2023. Selama tahun berjalan terdapat perubahan anggaran dikarenakan adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk belanja pegawai dan Pelatihan Dasar CPNS dengan total Rp 3.547.139.000 serta dana blokir sebesar Rp 75.000.000 akibat kebijakan penyesuaian belanja negara sesuai surat edaran Menteri Keuangan nomor S-1023/MK.02/2024 tentang instruksi penghematan anggaran belanja perjalanan dinas kementerian/lembaga sebesar minimal 50% dari sisa pagu anggaran, sehingga jumlah pagu Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah menjadi Rp 13.291.666.000 (pagu efisiensi).

Dari pagu tersebut telah direalisasikan program layanan yang secara keseluruhan mampu menyerap anggaran dengan maksimal dengan rata-rata persentase capaian di atas 90%.

## Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Keuangan

Berikut perbandingan capaian kinerja keuangan TA 2023 dengan Tahun 2024.

Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan

Jenis Belanja	2023			2024		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Pegawai	1.468.619.000	1.430.988.435	97,44%	1.563.514.000	1.538.635.722	98,41%
Belanja Barang	6.995.526.000	6.759.376.870	96,62%	10.913.551.000	10.846.166.636	99,38%
Belanja Modal	5.823.607.000	5.801.629.795	99,62%	814.601.000	809.072.000	99,32%
<b>Jumlah</b>	<b>14.287.752.000</b>	<b>13.991.995.100</b>	<b>97,93%</b>	<b>13.291.666.000</b>	<b>13.193.874.358</b>	<b>99,26%</b>

Dari data di atas diketahui bahwa :

- Pagu anggaran Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2024 relatif tidak jauh berbeda. Adanya peningkatan belanja pegawai di Tahun 2024 dikarenakan penambahan pegawai program re-entry yang ditugaskan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah.
- Pagu anggaran Belanja Barang Tahun 2024 meningkat dibandingkan Tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya Pelatihan Dasar CPNS yang diselenggarakan bagi 395 orang CPNS pada wilayah Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan anggaran sekitar Rp 3 milyar.
- Pagu anggaran Belanja Modal Tahun 2023 lebih besar dibandingkan Tahun 2024. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2023 terdapat pembangunan Rumah Dinas, Kolam Retensi dan Lapangan Tenis Outdoor dengan biaya sekitar Rp 5 milyar.

A stack of several books is placed on a wooden surface. On top of the stack sits a small white pot containing a green succulent plant. The background is a blurred bookshelf filled with many books of various colors and sizes. The text 'BAB IV' and 'PENUTUP' is overlaid on the image in a bold, black, sans-serif font.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

## A. Simpulan

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah secara umum dapat merealisasikan seluruh target capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah disepakati pada awal Tahun 2024.

Berdasarkan capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Tahun 2024 yang tercerminkan dari capaian dalam Perjanjian Kinerja maka dapat disimpulkan bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah telah berupaya semaksimal mungkin dalam mewujudkan dan merealisasikan target yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, anggaran, dan dari segi sarana prasarananya.

Total pagu anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 13.291.666.000. Dalam pelaksanaan kegiatan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Tahun 2024 telah menyerap anggaran senilai Rp **13.193.874.358** atau sebesar 99,26% dari total anggaran.

## B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, dapat kami sampaikan saran sebagai berikut :

1. Menjadikan evaluasi capaian kinerja tahun ini sebagai bahan penyusunan strategi mencapai kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya;
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak lainnya agar capaian kinerja semakin optimal;
3. Percepatan anggaran terus ditingkatkan sehingga dapat mempertahankan capaian realisasi anggaran tetap maksimal di tahun berikutnya.



# LAMPIRAN

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2024 (awal)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kaswo  
Jabatan : Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Iwan Kurniawan  
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

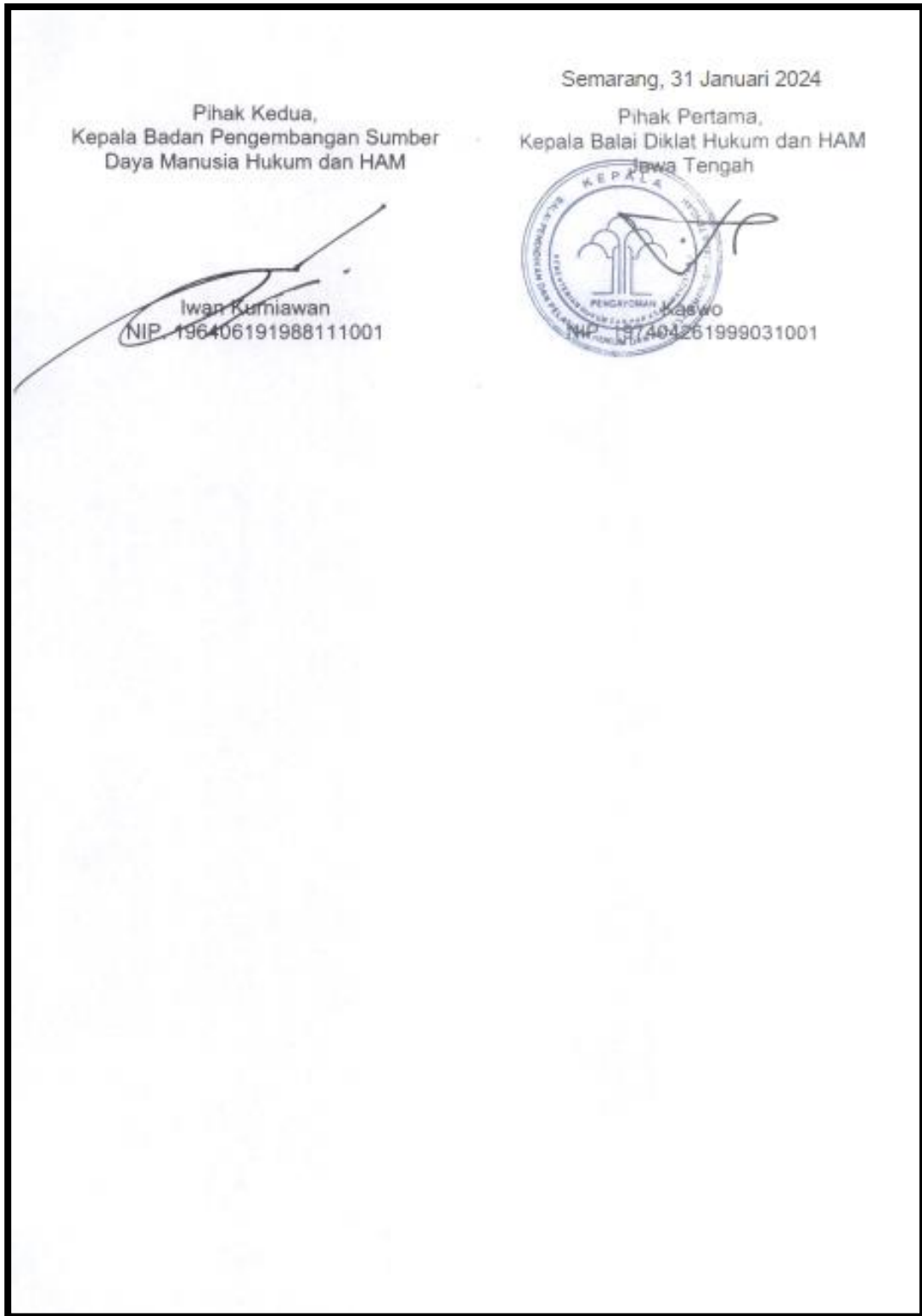
Semarang, 31 Januari 2024

<p>Pihak Kedua, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM</p>  <p>Iwan Kurniawan NIP. 196405191988111001</p>	<p>Pihak Pertama, Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah</p>   <p>Kaswo NIP. 197404261999031001</p>
---	--

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH  
DENGAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
HUKUM DAN HAM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Jawa Tengah	Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum dan HAM terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum dan HAM Balai Diklat Jawa Tengah	3,6
2.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah	100%
		Indeks kepuasan satuan kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan	3,1 (Indeks)

No.	Kegiatan	Anggaran
<b>Penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara</b>		<b>Rp. 9.786.483.000 ,-</b>
1.	Layanan BMN	Rp. 59.828.000,-
2.	Layanan Hubungan Masyarakat	Rp. 130.064.000,-
3.	Layanan Protokoler	Rp. 58.140.000,-
4.	Layanan Umum	Rp. 378.690.000,-
5.	Layanan Perkantoran	Rp. 4.186.483.000,-
6.	Layanan Manajemen SDM	Rp. 324.706.000,-
7.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 4.045.730.000,-
8.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 102.514.000,-
9.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 104.368.000,-
10.	Layanan Manajemen Keuangan	Rp. 153.456.000,-
11.	Layanan Reformasi Kinerja	Rp. 214.504.000,-
12.	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Rp.28.000.000,-





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kaswo

Jabatan : Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 31 Januari 2024

Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM  
Jawa Tengah



Kaswo  
NIP. 497404261999031001

## Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2024 (akhir)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rinto Gunawan Sitorus  
Jabatan : Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Gusti Ayu Putu Suwardani  
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 9 Desember 2024

<p>Pihak Kedua, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum</p>  <p>Gusti Ayu Putu Suwardani NIP. 196610261990012001</p>	<p>Pihak Pertama, Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah</p>  <p>Rinto Gunawan Sitorus NIP. 198208292008011001</p>
---	---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH  
DENGAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Jawa Tengah	Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum dan HAM terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum dan HAM Balai Diklat Jawa Tengah	3,6
2	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah	100%
		Indeks kepuasan satuan kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan	3,1 (Indeks)

No.	Kegiatan	Anggaran
<b>Penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara</b>		<b>Rp. 13.291.666.000,-</b>
1.	Layanan BMN	Rp 48.780.000,-
2.	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp 12.815.000,-
3.	Layanan Protokoler	Rp 51.000.000,-
4.	Layanan Umum	Rp 274.660.000,-
5.	Layanan Perkantoran	Rp 5.125.850.000,-
6.	Layanan Sarana Internal	Rp 466.845.000,-
7.	Layanan Prasarana Internal	Rp 347.756.000,-
8.	Layanan Manajemen SDM	Rp 430.920.000,-
9.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Rp 6.313.585.000,-
10.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 71.862.000,-
11.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 47.155.000,-
12.	Layanan Manajemen Keuangan	Rp 56.470.000,-
13.	Layanan Reformasi Kinerja	Rp 42.968.000,-
14.	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Rp 1.000.000,-

Semarang, 9 Desember 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Hukum



Gusti Ayu Putu Suwardani  
NIP. 196610261990012001

Pihak Pertama,  
Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM  
Jawa Tengah



Rinto Gunawan Sitorus  
NIP.198208292008011001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rinto Gunawan Sitorus

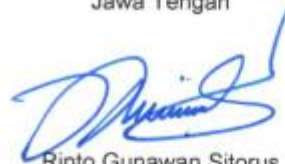
Jabatan : Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Semarang, 9 Desember 2024

Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM  
Jawa Tengah



Rinto Gunawan Sitorus  
NIP.198208292008011001

### Lampiran 3. Manual IKU Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah

 <b>MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</b>	
<b>SASARAN KEGIATAN (SK)</b> SK.5249.3 Terwujudnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Hukum dan HAM di wilayah Jawa Tengah	<b>PENANGGUNG JAWAB IKU</b> Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah
<b>INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)</b> ISK.5249.3.1 Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum dan HAM terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum dan HAM Balai Diklat Jawa Tengah	<b>Target 2024</b> <b>3,6</b>
<b>DEFINISI</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan yang diberikan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tahun berjalan.</li><li>• Program pelatihan dianggap efektif apabila proses pelatihan dapat memuaskan peserta diklat (<i>customer satisfaction</i>), sehingga mereka tertarik dan termotivasi untuk belajar dan berlatih, yang akhirnya timbul reaksi yang menyenangkan dari pelatihan.</li><li>• Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah diukur berdasarkan parameter tenaga pengajar, modul dan penyelenggaraan pelatihan.</li></ul>	
<b>BUKTI REALISASI/PEMENUHAN</b> Laporan hasil survei kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah	<b>SUMBER DATA</b> Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah
<b>FORMULA / CARA MENGHITUNG</b>	
$\text{Tingkat Kepuasan Peserta} = [(W_1 \times A) + (W_2 \times B) + (W_3 \times C)] \times 4$	
<b>Keterangan:</b> A: Persentase Evaluasi Tenaga Pengajar B: Persentase Evaluasi Modul Pelatihan C: Persentase Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan	



## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

### SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.5249.4 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

### INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.5249.4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

### PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

Target 2024

100%

### DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.

### BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

### SUMBER DATA

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

### FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah}} \times 100\%$$

### CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN


1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan formula diatas

### LEVEL KINERJA

Taktikal

### TIPE INDIKATOR

Exact

 **MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**SASARAN KEGIATAN (SK)**

SK.5249.4 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

**INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)**

ISK.5249.4.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan

**PENANGGUNG JAWAB  
IKU**

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

Target 2024

3,10

**DEFINISI**

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
  1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
  2. Kejelasan informasi layanan (L2)
  3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
  4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
  5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
  6. Kepuasan terhadap pemberi layanan (staf/petugas) (L6)
  7. Kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan (staf/petugas) (L7)
  8. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L8)
  9. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L9)
  10. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L10)

**BUKTI REALISASI/PEMENUHAN**

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan

**SUMBER DATA**

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

**FORMULA / CARA MENGHITUNG**

Cara manual menggunakan MS. Excel

Lampiran 4. Realisasi Anggaran per Tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan SAKTI

<b>LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024</b>							
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;							
Periode Desember 2024							
Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI							
Unit Organisasi : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA							
Satuan Kerja : 409157 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH						Hal 1 dari 30	
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>13,291,666,000</b>	<b>0</b>	<b>11,852,255,999</b>	<b>1,341,618,359</b>	<b>13,193,874,358</b>	<b>99.26 %</b>	<b>97,791,642</b>
WAProgram Dukungan Manajemen	13,291,666,000	0	11,852,255,999	1,341,618,359	13,193,874,358	99.26 %	97,791,642
WA.5249 Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah	13,291,666,000	0	11,852,255,999	1,341,618,359	13,193,874,358	99.26 %	97,791,642
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,513,105,000	0	5,086,539,964	379,278,343	5,465,818,307	99.14 %	47,286,693
EBA.956 Layanan BMN	48,780,000	0	48,082,405	544,000	48,626,405	99.69 %	153,595
051 Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	48,780,000	0	48,082,405	544,000	48,626,405	99.69 %	153,595
051.0A Layanan Pengadaan BMN	3,264,000	0	2,720,000	544,000	3,264,000	100.00 %	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	3,264,000	0	2,720,000	544,000	3,264,000	100.00 %	0
000001. Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	3,264,000	0	2,720,000	544,000	3,264,000	100.00 %	0
051.0B Penatausahaan BMN	45,516,000	0	45,362,405	0	45,362,405	99.66 %	153,595
521211 Belanja Bahan	210,000	0	58,200	0	58,200	27.71 %	151,800
000002. Kudapan Rapat	150,000	0	0	0	0	0.00 %	150,000
000003. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	60,000	0	58,200	0	58,200	97.00 %	1,800
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45,156,000	0	45,154,205	0	45,154,205	100.00 %	1,795
000004. Transportasi Darat	2,387,000	0	2,386,095	0	2,386,095	99.96 %	905
000005. Tiket	11,133,000	0	11,132,750	0	11,132,750	100.00 %	250
000006. Taksi Tujuan	925,000	0	924,860	0	924,860	99.98 %	140
000007. Taksi Asal	81,000	0	80,500	0	80,500	99.38 %	500
000008. Penginapan Gol. III	13,140,000	0	13,140,000	0	13,140,000	100.00 %	0
000009. Uang Harian	17,490,000	0	17,490,000	0	17,490,000	100.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00 %	0
000010. Transport Lokal	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00 %	0
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	12,815,000	0	12,802,500	0	12,802,500	99.90 %	12,500
051 Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	12,815,000	0	12,802,500	0	12,802,500	99.90 %	12,500
051.0A Publikasi dan Promosi	9,750,000	0	9,750,000	0	9,750,000	100.00 %	0
521211 Belanja Bahan	6,750,000	0	6,750,000	0	6,750,000	100.00 %	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.